

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan pemerintahan terhadap perubahan adanya *good government* dalam pemerintah, proses dan tujuannya *good governance* lebih cenderung ke efektif dan efisien sehingga dalam suatu proses pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor diterapkan pada *good governance*, perlu waktu untuk memikirkan bagaimana kita dapat mencapai tingkat persatuan dan dapat bekerjasama untuk menanamkan kepercayaan di masyarakat. Karena harus memerlukan otonomi untuk membuat keputusan, seperti halnya sumber daya, anggaran, dan tujuan. serta tujuan kinerja yang terstruktur.¹

Pemerintah juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, dan jika mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut, mereka diharapkan dapat menjalankan kekuasaan politik, administrasi dan ekonominya dengan baik. Prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan efisiensi, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, serta visi strategis.²

Konsep *good governance* didalam suatu negara adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan yang baik. Praktik tata kelolanya *good governance* yaitu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan efektif adalah apabila dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, profesionalisme dan mempunyai etika yang tinggi.³

¹Yogi Setiawan. Erwin Resmawan. Daud Kondorura, “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Good Governance Di Kantor Camat Samarinda Seberang”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 6, No 1 Tahun 2018, hal 16 -17, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/>

²Safrijal. M. Nasir Basyah. Hasbi Ali, “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol 1 No 1, Agustus 2016, hal 177, <https://jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/482>

³Hendi Sandi Putra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri, hal 2, <https://repository.unair.ac.id/68212/>.

Good governance memungkinkan para aktivis mewujudkan pemerintahan melalui partisipasi aktor dan institusi di luar pemerintahan dalam proses demokratisasi. Sebagai hasilnya negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar dapat memperoleh manfaat dari pembagian tanggung jawab dan wewenang yang lebih adil, adanya pembagian wewenang dimaksudkan agar terjadi pengendalian dan keseimbangan serta melengkapi dan menyeimbangkan ketiga unsur yang secara bersama-sama menghasilkan energi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.⁴

Semangat era reformasi ini telah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kepemimpinan nasional serta pembangunan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, pemerintah telah meminta masyarakat untuk mewaspadai pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), sehingga dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan yaitu pelayanan publik yang baik dan pemerintahan yang bersih, oleh karena itu, penerapan konsep pemerintahan yang baik dalam terselenggaranya pemerintahan adalah syarat yang harus dilaksanakan. Praktik pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi rakyat, impian, cita-cita bangsa dan negara.⁵

Penerapan *good governance* merupakan salah satu sarana untuk dapat memberikan sebuah informasi dan keterbukaan informasi publik guna untuk mewujudkan *good governance* dari tingkat nasional sampai tingkat desa, contoh penerapan *good governance* dari tingkat nasional yaitu salah satunya penerbitan buku *Best Practice* tentang tata kelola pemerintah yang baik oleh BPKP, yang ada di wilayah Jawa Tengah, dimana dalam pembuatan buku ini bertujuan untuk setiap daerah dapat mempelajari buku tersebut, dan dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik,⁶ kemudian, contoh penerapan *good governance* yang ada di tingkat daerah yaitu salah satunya penerapan prinsip *good governance* yang ada di Kabupaten Blitar, dimana dalam penerapannya dilakukan dengan cara mengadakan Musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda,

⁴Agus Dwiyanto, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, (Yogyakarta :Gajah Mada University Press) hal 17

⁵Nasrullah Nazsir, “Good Governance”, Mediator, Vol 4, No 1 Tahun 2003, hal 135 -136, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/831>

⁶<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-jadi-contoh-penerapan-good-governance-nasional/>

tujuan dari adanya pelaksanaan Musrenbang yaitu dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar.⁷

Selanjutnya contoh penerapan prinsip *good governance* di tingkat Kecamatan yaitu salah satunya ada di Kecamatan Paten Kota Makassar, dimana dalam penerapan yang dilakukan yaitu dengan menjalankan pelayanan administrasi yang optimal, tujuannya agar terciptanya pelayanan administrasi yang baik dapat diterapkan di pemerintah Kecamatan Paten,⁸ dan contoh penerapan *good governance* di tingkat desa yaitu salah satunya berada di Desa Kalibelo yaitu dengan memberikan informasi terkait penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui rapat tahunan yang diadakan pada awal tahun dan akhir tahun yang biasanya disebut Musrebangdes.⁹

Good governance dalam perpektif Islam dipandang sebagai gerakan Ijtihadi, oleh karena itu, konsep maslahat mursalah dijadikan sebagai acuan dalam sistem pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Gagasan maslahat mursalah sangat baik untuk keadaan dan tempat yang dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi pemerintah dan mendorong pemerintahan yang baik, karena semua kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat yang dijalankannya. Pemerintahan yang baik merupakan bagian dari fikih siyasah, karena semua kebijakan pemerintah didasarkan pada hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan, Selain itu, kebijakan pemerintah tentunya sejalan dengan ajaran Islam agar dapat mencapai cita-cita *good governance*. Hubungan antara *good governance* dan fikih siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah. Kebijakan dan keputusan dalam fikih siyasah selalu berdasarkan ajaran Islam atau wahyu ilahi sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia.¹⁰

Menurut KBBI, partisipasi adalah suatu perihal untuk berperan dalam melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan menurut Suteng partisipasi adalah sebagai bagian dari upaya kelompok untuk

⁷Zulfikar Bintang Palaguna Sumatri, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar”. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5938/5226>.

⁸Fidyah Nita Ramadani, “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makasar)”. <http://eprints.unm.ac.id/10078/>

⁹Hendi Sandi Putra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance diDesa Kalilebo Kabupaten Kediri

¹⁰Sri Warjiyati,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik”, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hal 127 -129

memajukan kebaikan bersama. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan anggota dalam kegiatan pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program yang sedang berjalan, dikarenakan dengan adanya partisipasi ini proses kegiatan yang dilakukan bermanfaat dan menuai hasil dari kerja keras yang dilakukan.

Partisipasi masyarakat adalah suatu aktivitas yang mengikutsertakan emosional seseorang dalam proses kinerja program yang dilaksanakan dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan untuk dapat mencapai tujuan bersama,¹¹ untuk dapat menciptakan masyarakat madani yaitu membutuhkan *good governance*, baik di tingkat nasional maupun lokal, hal ini akan memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam pemerintahan yang menerapkan baik. Masyarakat yang baik dan bijak ketika menjalankan pemerintahan, maka masyarakat yang seperti itu akan menjadi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam berbagai keputusan kebijakan pemerintah dan secara efektif mengawasi administrasi pemerintah, di sisi lain, jika masyarakat dalam menjalankan pemerintah masih inkompeten dan bermasalah, peluang penegakan *good governance* sangat tipis untuk dapat ditegakkan.¹²

Bentuk partisipasi tokoh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan penerapan prinsip *good governane* yaitu seperti perencanaan pembangunan yang dimana bentuk partisipasi tersebut memberikan sebuah ide maupun gagasan didalam suatu pertemuan atau rapat untuk dapat memberikan usulan terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, seperti halnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari yang memfokuskan dan mengacu terhadap pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), diantaranya program peningkatan infrastruktur dan program peningkatan ekonomi, dan bentuk partisipasi tokoh masyarakatnya yaitu dengan diadakan pelaksanaan musrenbang,

¹¹Muhammad Awalil Resky S, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance*", <https://osf.io/hqxu5/download>

¹²Irma Sunarty, Djanus Djamin, "*Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa*", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol 3, No 1, hal 26

dengan adanya pelaksanaan musrenbang ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.¹³

Fiqh siyasah adalah tarkib idhafi, atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *siyasah*. Makna bentuk masdar dari kata *faqah-yafqahu-fiqh*, yang berarti memahami maksud perkataan dan perbuatan tertentu, sedangkan secara terminologi istilah *fiqh* lebih umum digunakan untuk menyebut ilmu hukum syara, yaitu perbuatan yang dapat dipahami melalui dalil-dalil yang mendalam, sedangkan *siyasah* dilihat secara terminology adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari keburukan.

Disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk dalam memahami urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa sesuai dengan dasar-dasar semangut syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴

Menurut perspektif Islam atau perspektif *fiqh siyasah*, tokoh masyarakat sama dengan Ahl Al Halli Wal al-Aqdi yaitu lembaga peradilan yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat dituntut untuk menyalurkan apa yang telah ia tamping dan diperoleh. Peran tokoh masyarakat disebut sebagai "Ahl Al Halli Wal al-Aqdi" dalam fikih siyasah. Hal ini menandakan bahwa sekelompok tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang diberikan kewenangan untuk menyalurkan hati nurani masyarakat. Dan penegasannya terdapat di dalam Al-Qur'an Qs Ali-Imron ayat 104.¹⁵

Peran tokoh masyarakat memang sangat diperlukan untuk dapat menerapkan prinsip *good governance*, karena dapat mempengaruhi adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, adapun tokoh yang dimaksud disini yaitu tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh elit politik, karena partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat terhadap pemerintah yaitu salah satunya

¹³Husnul Imtihan. Wahyunadi.Firmansyah, "*Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*", Jurnal Neo-Bis, Vol 11 No 1, Juni 2017.

¹⁴Ozi Muammar Syam, Skripsi, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqh Siyasah*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 30

¹⁵Dian Puspita Sari, "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)*" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Hal 74

berpartisipasi dalam musyawarah bersama, tujuannya pemerintahan yang berada di Kecamatan Gembong dapat menampung segala keluhan dan harapan masyarakat Kecamatan Gembong untuk kedepannya nanti, selain itu peran tokoh masyarakat juga berperan aktif dalam peningkatan partisipasi pembangunan, seperti pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa pintar sebagai syarat agar masyarakat lebih mampu menggali potensi dan meningkatkan kapasitasnya, maka keinginan tersebut didorong oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penerapan *good governance* merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan *good governance* dengan baik, baik dalam tahap pelaksanaan, perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan, yang dimaksud dalam tokoh masyarakat disini yaitu seperti Bapak Sofwan yang berada di Desa Plukaran, beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di desa tersebut, keterlibatan beliau dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut sangat berperan sekali salah satunya dalam pembangunan masjid yang ada di Desa Plukaran yang dimana dalam pembangunan masjid dilakukan dengan gotong royong dan menyalurkan bantuan sumbangan untuk dana pembangunan jika dalam pelaksanaan pembangunan mengalami kekurangan biaya dan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah dilakukan secara rutin dengan pendekatan secara akrab, salah satunya dengan menyampaikan ceramah tentang agama, dan saling bertukar pikiran dengan antar masyarakat.

Partisipasi selanjutnya yaitu tokoh pendidikan, seperti bapak K.H.Rusdi selaku tokoh pendidikan yang berada di Desa Bageng yang dimana beliau selalu memberikan ide maupun perkembangan mutu pendidikan untuk anak – anak yang menempuh pendidikan sekolah dasar maupun di madrasah diniyah tujuannya untuk menciptakan generasi pemuda yang cerdas dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, selanjutnya prinsip *good governance* yang akan diteliti yaitu dalam peningkatan pengelolaan desa wisata yang ada di Desa Bageng dan pengelolaan sampah yang berada di Desa Bermi, dari kedua desa tersebut peran tokoh elit politik desa sangat berperan sekali dalam memberikan pengarahan untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang diharapkan, selain tokoh elit politik, tokoh pemuda yang ada di kedua desa tersebut juga terlibat seperti dalam kegiatan karang taruna yang dimana dalam kegiatan pemuda tersebut juga berperan aktif dalam mengembangkan pengelolaan desa wisata di

Desa Bageng dan melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah untuk mewujudkan smart village yang berada di Desa Bermi.

Partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong yaitu dapat mempengaruhi pelaksanaan peningkatan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong, pada hakekatnya peran tokoh masyarakat sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik buat meneliti permasalahan mengenai. “**Peran Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gembong terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* : Tinjauan *Fiqih Siyasah*”**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peran tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong terhadap pelaksanaan prinsip *good governance* dalam tinjauan fiqih siyasah, dimana peran tokoh masyarakat terhadap penerapan prinsip *good governance* dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sangat penting untuk dijalankan. Selain itu dapat memberikan perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah, pemeliharaan moral, prinsip keadilan, dan solidaritas sosial, serta perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Misalnya, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum di berbagai bidang kehidupan berbangsa

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang ruang lingkup masalah yang akan dipertimbangkan, dan berdasarkan identifikasi masalah, setelah penulis memberikan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.:

1. Bagaimana Peran Tokoh masyarakat dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Gembong ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Gembong menurut Tinjauan *Fiqih Siyasah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian yang berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip *good governance* menurut tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan Gembong

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara akademis dan praktis.

1. Secara Akademik

Penelitian secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran tokoh masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam tinjauan fiqh siyasah, dan diharapkan pembaca bisa menjadikan bahan bacaan ini menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis ini dapat digunakan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung peran tokoh masyarakat untuk menerapkan prinsip *good governance* disetiap daerah, khususnya dalam memberikan partisipasi yang baik kepada pemerintahan, selain itu lebih mengetahui peran tokoh masyarakat dan pemerintahan yang baik dengan tinjauan fiqh siyasah, dikarenakan standar penyelenggaraan pemerintah yang baik itu menjadi sebuah tolak ukur dalam menjalankan pemerintah yang baik dan berkualitas.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi atau penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk dapat mempermudah gambaran dari masing – masing bagian yang saling berhubungan, sehingga dapat membentuk penelian secara sistematis dan ilmiah. Dalam proposal skripsi ini terdiri dari tiga sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini diawali dengan, sampul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel

2. Bagian Tengah

Ada tiga bab dalam bagian ini, dan setiap bab merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, maka bab tersebut terhubung satu sama lain, tiga bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ke dua ini memuat uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang tengah dipelajari. Kerangka teori yang akan digunakan yaitu tentang teori *good governance* dan fiqh siyasah, dalam kerangka teori ini menjelaskan mengenai peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* menggunakan tinjauan fiqh siyasah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lokasi dan waktu penelitian merupakan setting penelitian. Kemudian tercantum subyek penelitian yang berfungsi sebagai sumber utama data penelitian ini, selain itu terdapat sumber data, metode pengumpulan data, pengujian validitas data, dan metode analisis data semuanya yang tercakup dalam bab ini

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan tentang peran tokoh masyarakat dalam melaksanakan prinsip *good governance* dengan tinjauan fiqh siyasah

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan, dan saran untuk menjadikan penelitian ini berkelanjutan.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka yang terdiri dari referensi yang berkaitan dengan penelitian

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penulis, untuk melengkapi data penelitian, lampiran juga disertakan di bagian ini.

